



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16 – 17, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21
TELEPON (021) 3846995, 3849623, FAKSIMILE (021) 3512215, SITUS www.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 160 /SJ.2/2018

15 Mei 2018

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Efektivitas Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah

- Yth. (1) Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Aceh
2. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Lampung
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan
4. Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Makassar
5. Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Semarang
6. Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Surabaya
7. Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN Medan

1 s.d. 7 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya di bidang penataan organisasi, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Selanjutnya, dalam rangka memastikan organisasi, tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik, efektif, dan efisien perlu dilakukan Monev organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian PAN-RB dalam setiap persetujuan tertulisnya mengenai penetapan organisasi Kementerian Keuangan yang selalu menekankan pentingnya melakukan evaluasi organisasi secara mandiri dan monitoring secara terus menerus (berkelanjutan).
3. Sehubungan dengan hal dimaksud, untuk mendapatkan gambaran riil mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi penerapan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan di daerah, kami bermaksud melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan menggunakan metode pengisian kuesioner.
4. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan kuesioner monev dimaksud untuk dapat diisi oleh Responden sebagaimana terlampir dan disampaikan kepada kami di alamat alby.shaoran@gmail.com paling lambat pada tanggal 26 Mei 2018. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Alby di nomor 081393444804.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro,

Dini Kusumawati

NIP 19740509 199903 2 001

Daftar Responden Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan di Daerah

No.	Unit	Nama	Tugas/Peran
1	Kanwil DJPB Provinsi Aceh	Irwansyah	<i>Admin Agency</i>
2	Kanwil DJPB Provinsi Aceh	Harry Pratama S.	Verifikator
3	KPTIK-BMN Makassar	Eko Syahrudin	<i>Admin Agency</i>
4	KPTIK-BMN Makassar	Mursalim	<i>Help Desk</i>
5	KPTIK-BMN Surabaya	Rizka Aryanda	Verifikator
6	KPTIK-BMN Semarang	Ahmadi	<i>Admin Agency</i>
7	KPTIK-BMN Semarang	Dias Panggalih	<i>Help Desk</i>
8	KPTIK-BMN Medan	Ivan Muhammad Rachmadie	<i>Admin Agency</i>
9	KPTIK-BMN Medan	Ruth Margareth Hotmauli Sinaga	Verifikator
10	KPTIK-BMN Medan	Masita	<i>Help Desk</i>
11	Kanwil DJPB Provinsi Lampung	Sukanto	<i>Admin Agency</i>
12	Kanwil DJPB Provinsi Lampung	Yatna Duriyatna	Verifikator
13	KPKNL Balikpapan	Muhiar	<i>Admin Agency</i>
14	KPKNL Balikpapan	Michael Fredrik Akay	Verifikator
15	KPKNL Balikpapan	Yohanes Eko Dedi Kurniawan	<i>Help Desk</i>



Kepala Biro,

[Signature]
Dini Kusumawati
NIP 19740509 199903 2 001